VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI

JALAN PERUBAHAN

UNTUK INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN

VISI, MISI DAN PLATFORM PERUBAHAN

AMANAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945:

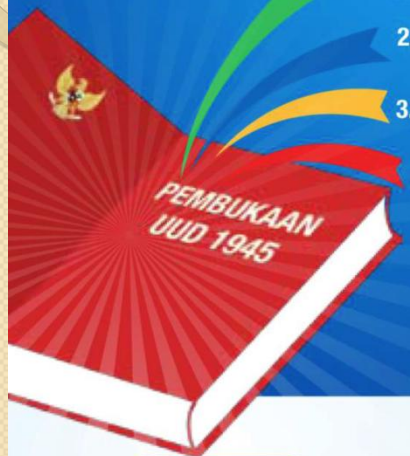

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. IKUT MEMELIHARA KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, KEADILAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN ABADI

VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI

1. MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL YANG MAMPU MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH, MENOPANG KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGAMANKAN SUMBERDAYA MARITIM, DAN MENCERMINKAN KEPRIBADIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM.
3. MEWUJUDKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF DAN MEMPERKUAT JATI DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM.
4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.
5. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING.
6. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN.

JALAN PERUBAHAN
JOKOWI - JK
UNTUK RAKYAT INDONESIA

MENGHADIRKAN NEGARA YANG BEKERJA

1. RASA AMAN DAN MELINDUNGI
2. PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM
3. PELAYANAN PUBLIK

KEMANDIRIAN YANG MENSEJAHTERAKAN

1. DAULAT PANGAN BERBASIS AGRIBISNIS KERAKYATAN
2. DAULAT ENERGI BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL
3. RESTORASI EKONOMI MARITIM INDONESIA

REVOLUSI MENTAL

1. EMANSIPASI
2. KEMANDIRIAN
3. KEBHINEKAAN

JOKO WIDODO
JUSUF KALLA
2014

NAWA CITA

JOKOWI - JK

UNTUK RAKYAT INDONESIA

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

1
KAMI AKAN MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGANEGARA.
NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS
POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF
MELINDUNGI HAK DAN KESELAMATAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN
KEDAULATAN MARITIM
MENINGKATKAN ANGGARAN PERTAHANAN 1,5 PERSEN DARI GDP DALAM 5 TAHUN KE DEPAN
MENGEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL
MENJAMIN RASA AMAN WARGANEGARA DENGAN MEMBANGUN POLRI YANG PROFESIONAL
VISI MISI JOKOWI JK

2
KAMI AKAN MEMBUAT PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS
MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI REFORMASI SISTEM KEPARTAIAN, PEMILU DAN LEMBAGA PERWAKILAN
MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN
MEMPERKUAT KANTOR KEPRESIDENAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN SECARA LEBIH EFEKTIF
MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI
MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK
VISI MISI JOKOWI JK

3
KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS
DESENTRALISASI ASIMETRIS
PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH TERUTAMA DESA, KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN PERBATASAN
PENATAAN DAERAH OTONOM BARU UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
IMPLEMENTASI UU DESA
VISI MISI JOKOWI JK

4

KAMI AKAN MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA.

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- MEMBANGUN POLITIK LEGISLASI YANG KUAT : PEMBERANTASAN KORUPSI, PENEGAKAN HAM, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP & REFORMASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
- MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
- MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN
- PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR DAN PENAMBANGAN LIAR
- PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA
- PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG
- MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH
- MELINDUNGI ANAK, PEREMPUAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL
- MENGHORMATI HAM DAN PENYELESAIAN SECARA BERKEADILAN TERHADAP KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM PADA MASA LALU
- MEMBANGUN BUDAYA HUKUM

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

5

KAMI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- PROGRAM **"INDONESIA PINTAR"** MELALUI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN BEBAS PUNGUTAN
- PROGRAM KARTU **" INDONESIA SEHAT "** MELALUI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
- PROGRAM **"INDONESIA KERJA"** DAN **"INDONESIA SEJAHTERA"** MELALUI REFORMASI AGRARIA 9 JUTA HA UNTUK RAKYAT TANI DAN BURUH TANI, RUMAH SUSUN BERSUBSIDI DAN JAMINAN SOSIAL

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

6

KAMI AKAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONALSEHINGGA BANGSA INDONESIA BISA MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- MEMBANGUN INFRASTRUKTUR JALAN BARU SEPANJANG SEKURANG-KURANGNYA 2000 KILOMETER
- MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 PELABUHAN BARU DAN MERENOVASI YANG LAMA
- MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 BANDARA BARU DAN MERENOVASI YANG LAMA
- MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 KAWASAN INDUSTRI BARU BERIKUT PENGEMBANGAN UNTUK HUNIAN BURUHNYA
- MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 5000 PASAR TRADISIONAL DI SELURUH INDONESIA DAN MEMODERNISASIKAN PASAR TRADISIONAL YANG TELAH ADA
- MENCIPTAKAN LAYANAN SATU ATAP UNTUK INVESTASI, EFISIENSI PERIJINAN BISNIS MENJADI MAKSIMAL 15 HARI
- MEMBANGUN SEJUMLAH *SCIENCE AND TECHNOPARK* DI KAWASAN POLITEKNIK DAN SMK-SMK DENGAN PRASANA DAN SARANA DENGAN TEKNOLOGI TERKINI

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

7

KAMI AKAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN
- MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI
- MEWUJUDKAN KEDAULATAN KEUANGAN
- MENDIRIKAN BANK PETANI/NELAYAN DAN UMKM TERMASUK GUDANG DENGAN FASILITAS PENGOLAHAN PASKA PANEN DI TIAP SENTRA PRODUKSI TANI/ NELAYAN
- MEWUJUDKAN PENGUATAN TEKNOLOGI MELALUI KEBIJAKAN PENCIPTAAN SISTEM INOVASI NASIONAL

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

8

KAMI AKAN MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- MEMBANGUN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- MENGEVALUSI MODEL PENYERAGAMAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- JAMINAN HIDUP YANG MEMADAI BAGI PARA GURU TERUTAMA BAGI GURU YANG DITUGASKAN DI DAERAH TERPENCIL
- MEMPERBESAR AKSES WARGA MISKIN UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN TINGGI
- MEMPRIORITASKAN PEMBIAYAAN PENELITIAN YANG MENUNJANG IPTEK

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

9

KAMI AKAN MEMPERTEGUH KE-BHINNEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

- MEMPERKUAT PENDIDIKAN KE-BHINNEKA-AN DAN MENCIPTAKAN RUANG-RUANG DIALOG ANTAR WARGA
- RESTORASI SOSIAL UNTUK MENGEMBALIKAN RUH KERUKUNAN ANTAR WARGA
- MEMBANGUN KEMBALI GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL MELALUI REKONSTRUKSI SOSIAL
- MENGEMBANGKAN INSENTIF KHUSUS UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MENGANGKAT KEBUDAYAAN LOKAL
- MENINGKATKAN PROSES PERTUKARAN BUDAYA UNTUK MEMBANGUN KEMAJEMUKAN SEBAGAI KEKUATAN BUDAYA

JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014 VISI MISI JOKOWI JK

NAWA CITA -1

1. POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF
2. KAMNAS BERBASIS TRI MATRA TERPADU
3. IDENTITAS NEGARA MARITIM

1. MELINDUNGI HAK DAN KESELAMATAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN

1. MENGAMANKAN KEPENTINGAN DAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA: KHUSUSNYA BATAS NEGARA, KEDAULATAN MARITIM, & SUMBER DAYA ALAM.

1. KERJASAMA GLOBAL DAN REGIONAL, MENINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN SELATAN-SELATAN

1. MEMINIMALISASI DAMPAK : GLOBALISASI, INTEGRASI EKONOMI REGIONAL DAN PERDAGANGAN BEBAS

1. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERTAHANAN DAN TNI YANG PROFESIONAL MELALUI : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT, PENYEDIAAN ALUTSISTA DAN PENINGKATAN ANGGARAN PERTAHANAN 1,5 PERSEN DARI GDP DALAM LIMA TAHUN KE DEPAN

1. KEMANDIRIAN PERTAHANAN MELALUI MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR,, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL & DIVERSIFIKASI KERJASAMA PERTAHANAN

1. MEMBANGUN POLRI YANG PROFESSIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT

NAWA CITA – 2:
PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA

- MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK PADA INSTITUSI-INSTITUSI DEMOKRASI MELALUI REFORMASI SISTEM KEPARTAIAN, PEMILU DAN LEMBAGA PERWAKILAN
- PENINGKATAN PERANAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN
- MEMPERKUAT KANTOR KEPRESIDENAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN SECARA LEBIH EFEKTIF
- MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN - AKSES INFORMASI PUBLIK DALAM UU No. 14 Tahun 2008
- REFORMASI BIROKRASI
- MENDORONG PARTISIPASI PUBLIK

NAWA CITA – 3:
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

- DESENTRALISASI ASIMETRIS
- MENSINERGIKAN TATA-KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA
- MENYELESAIKAN PROBLEM FRAGMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN POLITIK DESENTRALISASI
- REFORMASI DALAM TATA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
- PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

- MENDORONG DAERAH UNTUK DAPAT MELAKUKAN PENGURANGAN *OVERHEAD COST* (BIAYA RUTIN) DAN MENG-ALOKASIKAN LEBIH BANYAK UNTUK PELAYANAN PUBLIK
- REFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI: PENGUATAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK. SERTA MENGAWAL IMPLEMENTASI UU DESA
- MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH NASIONAL UNTUK LEBIH MENJALANKAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

NAWA CITA 4:
MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI

- PEMBERANTASAN KORUPSI, PENEGAKAN HAM, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REFORMASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
- PEMBERANTAS KORUPSI DENGAN KONSISTEN DAN TERPERCAYA DENGAN MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN DAN PENINDAKAN TEGAS TERHADAP KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN
- BERKOMITMEN MELINDUNGI ANAK, PEREMPUAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERMARJINAL
- MENGHORMATI HAM DAN PENYELESAIAN SECARA BERKEADILAN TERHADAP KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM PADA MASA LALU
- PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR DAN PENAMBANGAN LIAR
- MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN DAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
- PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
- PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA
- MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN MENENTANG KRIMINALISASI PENUNTUTAN KEMBALI HAK TANAH MASYARAKAT
- BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

NAWA CITA-5:
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN PROGRAM "INDONESIA PINTAR" DENGAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN BEBAS PUNGUTAN

MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGINISIASI KARTU "INDONESIA SEHAT"

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PROGRAM "INDONESIA KERJA" DAN "INDONESIA SEJAHTERA" DENGAN MENDORONG *LAND REFORM* DAN PROGRAM KEPEMILIKAN TANAH SELUAS 9 JUTA HEKTAR; PROGRAM RUMAH KAMPUNG DERET ATAU RUMAH SUSUN MURAH YANG DISUBSIDI SERTA JAMINAN SOSIAL UNTUK SELURUH RAKYAT DI TAHUN 2019

NAWA CITA 6:
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA BISA MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR JALAN BARU SEPANJANG SEKURANG-KURANGNYA 2000 KILOMETER DAN MEMPERBAIKI KUALITAS JALAN TERUTAMA DI LUAR JAWA DAN DAERAH-DAERAH TERTINGGAL

MENINGKATKAN ANGGARAN RISET UNTUK MENDORONG INOVASI TEKNOLOGI, DAN MENJADIKAN INSTANSI URUSAN HAK CIPTA DAN PATEN BEKERJA PROAKTIF MELAYANI PARA INOVATOR DAN PARA INVENTOR

MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 5000 PASAR TRADISIONAL PASAR TRADISIONAL DI SELURUH INDONESIA DAN MEMODERNISASIKAN PASAR TRADISIONAL YANG TELAH ADA

MENCIPTAKAN LAYANAN SATU ATAP UNTUK INVESTASI, EFISIENSI PERIJINAN BISNIS MENJADI MAKSIMAL 15 HARI

MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 PELABUHAN BARU DAN MERENOVASI YANG LAMA

MELUNCURKAN INSENTIF KEBIJAKAN FISKAL DAN NON-FISKAL UNTUK MENDORONG INVESTASI SEKTOR HULU DAN MENENGAH

MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 BANDARA BARU DAN MERENOVASI YANG LAMA

MENDORONG BUMN MENJADI AGEN PEMBANGUNAN DAN MENDIRIKAN SECARA KHUSUS BANK PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

MEMBANGUN SEKURANG-KURANGNYA 10 KAWASAN INDUSTRI BARU BERIKUT PENGEMBANGAN UNTUK HUNIAN BURUHNYA

MEMBANGUN SEJUMLAH *SCIENCE DAN TECHNO PARK* DI DAERAH-DAERAH, POLITEKNIK DAN SMK-SMK DENGAN PRASANA DAN SARANA DENGAN TEKNOLOGI TERKINI

MENINGKATKAN DAYA SAING INI UNTUK MEMANFAATKAN POTENSI YANG BELUM TERGARAP DENGAN BAIK TETAPI MEMBERI PELUANG BESAR UNTUK MENINGKATKAN AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL, YAKNI, INDUSTRI MANUFAKTUR, INDUSTRI PANGAN, SEKTOR MARITIM, DAN PARIWISATA

NAWA CITA – 7:
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN : KEBIJAKAN PERBAIKAN IRIGASI RUSAK DAN JARINGAN IRIGASI SEKURANG-KURANGNYA DI TIGA JUTA HEKTAR SAWAH

MENGADAKAN SEKURANG-KURANGNYA SATU JUTA HEKTAR LAHAN SAWAH BARU DI LUAR JAWA

MENDIRIKAN BANK PETANI DAN UMKM TERMASUK GUDANG DENGAN FASILITAS PENGOLAHAN PASCA PANEN DI TIAP SENTRA PRODUKSI

PEMULIHAN KUALITAS KESUBURAN LAHAN YANG AIR IRIGASINYA TERCEMAR OLEH LIMBAH INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA, PENGHENTIAN KONVERSI LAHAN PRODUKTIF

KAMI AKAN MENINGKATKAN EFISIENSI USAHA BUMN PENYEDIA ENERGI DI INDONESIA (E.G. PERTAMINA, PLN, PGN); PEMBANGUNAN PIPA GAS SERTA PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

MEMBERI PRIORITAS PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TERUTAMA BERSUMBER DARI GAS, BATUBARA, PANAS BUMI, DAN TENAGA AIR UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI LISTRIK DALAM NEGERI GUNA MELAYANI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI

MEWUJUDKAN KEDAULATAN KEUANGAN MELALUI KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN MENCAPAI 50 PERSEN PENDUDUK; MENINGKATKAN RASIO PAJAK TERHADAP GDP SECARA BERTAHAP MENJADI 16 persen

MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI MELALUI KEBIJAKAN PENGURANGAN IMPOR ENERGI MINYAK DENGAN MENINGKATKAN EKPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS DI DALAM DAN LUAR NEGERI

MEWUJUDKAN PENGUATAN TEKNOLOGI MELALUI KEBIJAKAN PENCIPTAAN SISTEM INOVASI NASIONAL : KHUSUSNYA UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI

MELAKUKAN PENGURANGAN UTANG PEMERINTAH SERTA PENGATURAN KETAT PENJUALAN SAHAM BANK NASIONAL PADA INVESTOR ASING

NAWA CITA 8: MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

MELAKUKAN PENATAAN KEMBALI KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL : KEWARGANEGARAAN (*CIVIC EDUCATION*), PENGAJARAN SEJARAH PEMBENTUKAN BANGSA, NILAI-NILAI PATRIOTISME DAN CINTA TANAH AIR, SEMANGAT BELA NEGARA DAN BUDI PEKERTI DI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA

KURIKULUM YANG MENJAGA KESEIMBANGAN ASPEK MUATAN LOKAL (DAERAH) DAN ASPEK NASIONAL, DALAM RANGKA KE-BHINNEKA-AN YANG TUNGGAL IKA, DENGAN TETAP MENJAGA RELEVANSI DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL

PEMBOBOTAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DENGAN MEMPERBESAR PORSI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PESERTA DIDIK.

MENGEVALUSI MODEL PENYERAGAMAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL –-TERMASUK DI DALAMNYA UJIAN AKHIR NASIONAL

MENGINISIASI UU WAJIB BELAJAR TANPA DIPUNGUT BIAYA

MEMBERIKAN JAMINAN HIDUP YANG MEMADAI BAGI PARA GURU TERUTAMA BAGI GURU YANG DITUGASKAN DI DAERAH TERPENCIL

MELAKUKAN PEMERATAAN FASILITAS PENDIDIKAN DI SELURUH WILAYAH TERUTAMA DI WILAYAH-WILAYAH YANG SELAMA INI DIIDENTIFIKASI SEBAGAI AREA DIMANA TINGKAT DAN PELAYANAN PENDIDIKAN RENDAH ATAU BURUK.

MEMBUAT KEBIJAKAN REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI TENAGA PENGAJAR (GURU) YANG BERKUALITAS DAN DILAKUKAN SECARA MERATA

PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PTN SEHINGGA MEMPERBESAR AKSES WARGA MISKIN

MEMPERBESAR PORSI PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN SAINS

MEMPRIORITASKAN PEMBIAYAAN UNTUK KEGIATAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNGGULAN

MENDORONG PENGEMBANGAN BUDAYA TEKNOLOGI DALAM MASYARAKAT, APARATUR PEMERINTAH, SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

NAWA CITA 9:
MEMPERTEGUH KE-BHINNEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

- MEMPERKUAT PENDIDIKAN KE-BHINNEKA-AN DAN MENCIPTAKAN RUANG-RUANG DIALOG ANTAR WARGA
- MENEGUHKAN RESTORASI SOSIAL UNTUK MENGEMBALIKAN RUH KERUKUNAN ANTAR WARGA SESUAI DENGAN JIWA KONSTITUSIONAL DAN SEMANGAT PANCASILA 1 JUNI 1945
- MENEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS UNTUK MELINDUNGI DAN MEMBERIKAN PENGHORMATAN PADA KE-BHINNEKA-AN
- MEMBANGUN KEMBALI MODAL SOSIAL MELALUI REKONSTRUKSI SOSIAL,
- MENGEMBANGKAN INSENTIF KHUSUS UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MENGANGKAT KEBUDAYAAN LOKAL SERTA MEMBENTUK LEMBAGA KEBUDAYAAN SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
- MENINGKATKAN PROSES PERTUKARAN BUDAYA
- MENGOPTIMALKAN PRANATA-PRANATA SOSIAL DAN BUDAYA YANG ADA